

ANALISIS PENGARUH SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ramlianty Badjulu

ramliantyrails@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The objectives of the study are: (1). To determine and analyze development of local revenue consisting of local taxes and local retribution in Tojo Una-una Regency, (2). To determine and analyze simultaneous impact local taxes and local retributions on regional spending allocation in Tojo Una-una Regency, (3). To determine and analyze partial impact of local taxes on regional spending allocation in Tojo Una-una Regency, (4). To determine and analyze simultaneous impact of local retributions on regional spending allocation in Tojo Una-una Regency. Based on the result of multiple regression testing, it is found $R^2 = 0.322$ or 32,2 %, it mean that independent variables namely local taxes and local retribution can explain the variation or have an influence on regional spending allocation at 32,2%, while the remaining 67,8 % is explained or influenced by other variables outside the model. Local taxes and local retributions have simultaneous and significant effect on regional spending allocation in Tojo Una-una Regency. Local taxes have significant effect on regional spending allocation in Tojo Una-una Regency.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terlatak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas *vertikal* (kepada pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002).

Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia dibidang keuangan daerah adalah relative kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi

penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah.

Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi cukup besar kepada daerah dalam penerimaan pendapatannya, yang dapat membantu memberikan efek terhadap pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah, sehingga belanja yang direncanakan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi penerimaan daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingginya penerimaan PAD akan dapat membiayai belanja daerah secara mandiri.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) dan PP No.58 Tahun 2005 pasal 22, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Salah satu langkah untuk membiayai kegiatan daerah khususnya Kabupaten Tojo Una-una yang terdapat dalam sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan yang cukup besar pada daerah Kabupaten Tojo Una-una dikarenakan

pemungutan tersebut merupakan iuran yang wajib di bayarkan masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas yang telah digunakan secara umum, sehingga dari penerimaan tersebut dapat menunjang pengeluaran daerah. Selain pajak, retribusi daerah merupakan sumbangsih kedua penerimaan pendapatan daerah yang membantu aktivitas daerah. Retribusi sangat membantu Kabupaten Tojo Una-una dikarenakan masih banyak obyek pemungutan retribusi yang dipungut pemerintah kepada masyarakat seperti retribusi rumah sakit.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum dilakukan pemungutan pada kabupaten Tojo Una-una, hal ini dikarenakan bahwa perusahaan daerah belum dapat memaksimalkan kegiatan dimana belum mampu mengelola aset daerah salah satunya tempat rekreasi pada Kabupaten Tojo Una-una yang belum dilakukan pemungutan retribusi padahal potensi pendapatan tersebut sehingga pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain belum terjadi pencatatan penerimaan pada pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Tojo Una-Una". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) Perkembangan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah pada Kabupaten Tojo Una-Una, (2) Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-Una. (3) Pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-Una. (4) Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-Una.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah verifikatif (kausalitas). Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y yang diteliti. Lokasi penelitian ini adalah seluruh instansi penghasil PAD Kabupaten Tojo Una-Una untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan alasan bahwa instansi tersebut berpengaruh langsung terhadap penerimaan dan penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengalokasian belanja daerah pada Kab.Tojo Una-Una. Populasi dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kabupaten Tojo Una-una dengan jumlah data yang akan dianalisis sebanyak 3 tahun. Banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam populasi ini berjumlah 52 SKPD Kabupaten Tojo Una-una.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Perkembangan Pajak selama tiga tahun mengalami peningkatan cukup signifikan walaupun ada hampir semua dinas yang mengalami penerimaan pajak terjadi fluktuasi seperti Dinas kesehatan, Dinas pekerjaan umum, Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, Dinas kependudukan dan catatan sipil Dinas pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan, dinas kehutanan, dinas pertambangan dan energi, dinas kelautan dan perikanan, dinas koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan selama 3 tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut masih mempelajari potensi daerah masing-masing tersebut dikarenakan kabupaten ini merupakan kabupaten kedua dari terakhir pada Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga

masih besar ketergantungan tersebut kepada propinsi untuk membiayai kegiatan tersebut.

Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Perkembangan retribusi menunjukkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan bahwa banyak obyek-obyek pemungutan retribusi yang baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-una. Beberapa satuan kerja perangkat daerah dalam hal penerimaan retribusi mengalami peningkatan dan adapula penerimaan retribusi tersebut mengalami fluktuasi. Dinas kesehatan yang terdiri atas rumah sakit umum dan dinas kesehatan menunjukkan penerimaan retribusi daerah meningkat selama 3 tahun terakhir, hal ini dikarenakan rumah sakit umum yang memiliki penerimaan yang cukup banyak atas pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat.

Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dan dinas kependudukan dan catatan sipil dan dinas kebudayaan dan pariwisata menunjukkan penerimaan retribusi fluktuatif. Menurunnya penerimaan tersebut dikarenakan penetapan pembayaran retribusi yang tidak menetap misalnya dinas perhubungan yaitu menurunnya retribusi jasa terminal, dan retribusi khusus tempat parkir, sehingga secara tidak langsung penerimaan retribusi tersebut tidak dapat dijadikan patokan sebagai penerimaan yang dapat membiayai belanja daerah.

Otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi umum, perangkat daerah dan kepegawaian menunjukkan retribusi yang cukup meningkat, hal dikarenakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup besar pada kecamatan walea besar. Dinas pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi mengalami penurunan penerimaan retribusi yang cukup besar. Hal ini dikarenakan misalnya dinas pertanian dan kehutnana menurunnya penerimaan sumbangan dari pihak ketiga. Dinas pertambangan dan energi jenis retribusi yang mengalami penurunan

yaitu pelayanan administrasi sehingga penerimaan tersebut cukup berpengaruh terhadap penerimaan daerah.

Perkembangan Target Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Perkembangan target belanja menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah meningkat. Satuan Kerja perangkat Daerah atas 10 dinas tersebut menunjukkan selama target yang ditetapkan meningkat terkecuali pada otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian mengalami penurunan sebesar Rp. (62.428.339.791),-. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa tidak melakukan penetapan target belanja daerah salah satunya adalah kecamatan walea besar yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una dikarenakan bahwa daerah tersebut jauh dari pusat kota kabupaten tersebut dan berada pada daerah kepulauan sehingga sulit dijangkau oleh pemerintah olehnya maka pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-una mengabil alih untuk melakukan target belanja sesuai dengan kebutuhan pada daerah tersebut. Belanja daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus terencana dengan baik. Anggaran yang direncanakan dengan baik akan memudahkan tahap implementasi dan memungkinkan dicapainya target secara efektif. Sebaliknya anggaran yang tidak terencana dengan baik meskipun diimplementasikan baik tidak akan mencapai hasil secara efektif.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik model linear dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran yang terjadi, jika hal tersebut terjadi akan mengakibatkan koefisien regresi memiliki standar error atau ragam (variance) yang besar, sehingga mengurangi kehandalan penaksiran parameter. Untuk memperoleh

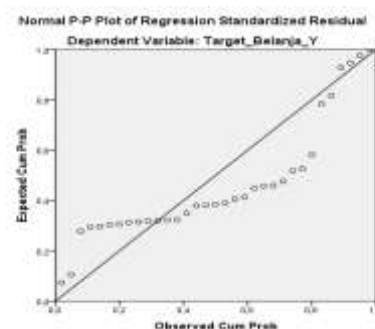
nilai pemerkiraan yang tidak bias dari model persamaan regresi berganda terhadap variabel-variabel yang diamati, maka asumsi klasik harus terpenuhi, uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi.

Uji Normalitas

Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sebuah diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan yaitu:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut gambar uji normalitas yang dilakukan pada program SPSS sebagai berikut:



Gambar 1 Grafik Normal P – P Plot

Metode yang handal adalah dengan melihat normal *Probability plot*, dimana pada grafik normal plot terlihat titik – titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sebagaimana di tampilkan pada gambar di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhak dilanjutkan ke analisis berikutnya yaitu uji multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi sesama variable bebas. Pada penelitian ini digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinearitas diantara variable bebas. Batas dari toleransi

value adalah 0,10 dan batas *VIF* adalah 10. Hal ini menandakan bahwa nilai *VIF* kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0.10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Pada tabel berikut ini disajikan hasil multikolinearitas antara variable bebas.

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak_Daerah_X1	,205	4,875
	Retribusi_Daerah_X2	,205	4,875

Sumber: Data Diolah, Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai *VIF* untuk kedua variable bebas (X) kurang dari 10 yang memperlihatkan tidak terdapat korelasi yang cukup kuat antara variable bebas, selain itu nilai toleransi yang kurang dari 1 antara variable bebas tidak mengandung masalah multikolinearitas. Nilai *VIF* dari pajak daerah sebesar 4.875 dan nilai *VIF* dari retribusi daerah sebesar 4.875. Dari hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dan berhak dilakukan ke pengujian berikutnya yaitu uji autokorelasi.

Uji Autokorelasi

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai uji Durbin Watson dengan (Santoso: 2004) sebagai berikut:

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif,
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi,
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negative

Berikut tabel autokorelasi yang terjadi pada penelitian ini adalah:

Tabel 2
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567 ^a	.322	.277	3.12839E10	2.048

Sumber: Data Diolah, Tahun 2014

Berdasarkan hasil regresi Pengaruh X_1 dan X_2 (realisasi pajak daerah dan realisasi retribusi daerah) terhadap variable Y (alokasi belanja daerah) dengan pengujian Durbin Watson menunjukkan bahwa nilai DW – hitung menunjukkan nilai 2.048. Menurut (Santoso: 2004) mengatakan bahwa angka DW diantara -2 sampai +2 dapat disimpulkan berarti tidak

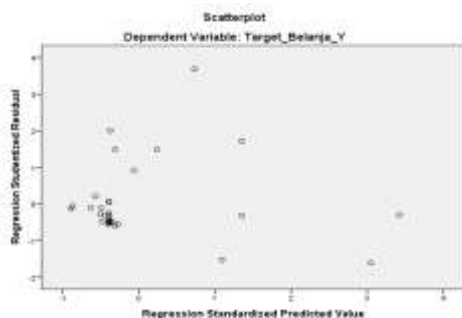
ada autokorelasi, sehingga pada penelitian ini nilai tabel DW pada penelitian tersebut tidak memiliki gejala autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian di atas maka penelitian ini dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas.

Uji Heterokedastisitas

Bila dengan diagram pencar menunjukkan adanya hubungan yang sistematis atau membentuk suatu pola tertentu, maka hal tersebut merupakan gejala heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada, yang membentuk suatu pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) terjadilah heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Di dalam pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini didasarkan pada Scatterplot. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik Scatterplot sebagai berikut:



Gambar 2 Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak, yang menunjukkan bahwa bulatan-bulatan kecil tersebut menyebar diantara angka negatif dan positif atau di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi penelitian ini.

Uji Regresi Berganda

Untuk menguji pengaruh realisasi pajak daerah (X_1) dan realisasi retribusi daerah (X_2) terhadap target belanja daerah (Y) pada Kabupaten Tojo Una-una digunakan analisis linier berganda dengan cara menguji makna dari koefisien regresinya. Hasil pengujian hubungan antar variable dependent dan independent dapat di lihat dengan menggunakan regresi linier berganda pada tabel di bawah ini:

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan pengujian simultan diperoleh dari hasil pengolahan SPSS 20 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Signifikansi F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.393E22	2	6.965E21	7.117	.003 ^a
	Residual	2.936E22	30	9.787E20		
	Total	4.329E22	32			

Sumber: Data Diolah, Tahun 2014

Tabel 3 merupakan hasil pengujian perhitungan statistik uji signifikansi F sebesar 7.117 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0.00 dengan tingkat keyakinan sebesar 95 % dan tingkat $\alpha = 5 \%$, karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05 yang

berarti bahwa secara simultan seluruh variabel bebas yaitu realisasi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu target belanja daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa realisasi pajak daerah dan retribusi

daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap target atau alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Untuk menentukan masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung digunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Signifikansi t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.852E10	6.065E9		3.054	.005
Pajak_Daerah_X1	27.336	7.863	1.154	3.477	.002
Retribusi_Daerah_X2	24.488	10.052	.809	2.436	.021

Sumber: Data Diolah, Tahun 2014

Tabel 4 merupakan tabel uji signifikansi t atau pengujian secara parsial antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang terdiri atas realisasi pajak daerah dan realisasi retribusi daerah terhadap alokasi belanja daerah. Nilai t pada variabel realisasi pajak daerah sebagai (X_1) sebesar 3.477 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0.00 dengan tingkat keyakinan sebesar 95 % dan tingkat α sebesar 5 % atau 0.05, karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari tingkat error sebesar 5 % yang artinya bahwa realisasi pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una.

Sumber pendapatan asli daerah untuk variabel realisasi retribusi daerah sebagai (X_2) menunjukkan nilai uji signifikansi t sebesar 2.436 dengan nilai probabilitas sebesar 0.02 dengan tingkat keyakinan sebesar 95 % dan tingkat α sebesar 5 % atau 0.05, karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari tingkat error sebesar 5 % yang artinya bahwa realisasi retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4 di atas maka dapat ditemukan bentuk hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini:

$$Y = 1.852 + 27.336 (X_1) + 24.488 (X_2)$$

Adapun asumsi dari persamaan yang terdapat pada tabel di atas yaitu sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah sebesar 1.852

Dapat dijelaskan bahwa apabila variabel dependen yaitu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang terdiri atas realisasi pajak daerah dan realisasi retribusi daerah bernilai nol maka alokasi belanja daerah pada Kabupaten tojo Una-una akan terjadi

peningkatan sebesar nilai konstanta tersebut yaitu sebesar 1.852.

2. Nilai koefisien regresi variabel realisasi pajak daerah (X_1) = 27.336

Dapat dijelaskan bahwa setiap peningkatan realisasi pajak daerah sebesar satu persen akan menambah jumlah alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una sebesar 27.336.

3. Nilai koefisien regresi variabel realisasi retribusi daerah (X_2) = 24.488

Dapat dijelaskan bahwa setiap peningkatan realisasi retribusi daerah sebesar satu persen akan menambah jumlah alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una sebesar 24.488.

Koefisien Detreminasi

Uji koefisien determinasi (R^2), digunakan untuk melihat berapa

proporsi/variasi kemampuan prediktor dari pajak daerah, retribusi daerah, berpengaruh secara bersama-sama terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil nilai *adjust R-square* dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya belanja daerah yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567 ^a	.322	.277	3.12839E10	2.048

Sumber: Data Diolah, Tahun 2014

Pengaruh variabel bebas (X) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Y) dapat di lihat pada nilai koefisien determinasi. Semakin tinggi nilai R Square menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan terhadap variabel tidak bebas semakin baik. Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat menunjukkan R^2 sebesar 0.322 atau sebesar 32.2 %, yang mempunyai makna bahwa variabel bebas yaitu realisasi pajak daerah dan realisasi retribusi daerah mampu menjelaskan variasi atau mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una sebesar 32.2% sedangkan sisanya sebesar 67.8% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten Tojo Una-Una

Ketidaktetapan atau terjadinya fluktuasi dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akhirnya menjadi kesulitan tersendiri bagi kabupaten tersebut dalam mengalokasi belanja daerah dikarenakan bahwa pada dasarnya penentuan pengalokasian belanja dilakukan dengan berbagai pertimbangan salah satunya adalah penerimaan pendapatan

asli daerah yang terjadi pada daerah tersebut. Jika pendapatan asli daerah berkurang maka pengalokasian belanja daerah pun harus berkurang akan tetapi daerah pun menjadi dilema dikarenakan bahwa setiap tahun kebutuhan daerah meningkat sehingga secara tidak langsung ketergantungan akan dana perimbangan seperti dana bagi hasil pajak, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum menjadi kebutuhan daerah dalam membiayai kegiatan daerah tersebut, sehingga tak jarang kebutuhan tersebut pun sebahagian akan ditutupi oleh propinsi itu sendiri salah satunya adalah Propinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojo una-Una melalui dana bagi hasil tersebut.

Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-una dalam penentuan alokasi belanja daerah yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi belanja daerah dilakukan dengan berdasarkan kegiatan yang dilakukan atau skala prioritas kegiatan setiap tahunnya, sehingga dengan adanya skala prioritas tersebut maka pemerintah dapat mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya sehingga jumlah alokasi belanja daerah tidak bisa menetap bahkan dapat terjadi

belanja menurun atau sebaliknya alokasi belanja dapat meningkat selama setahun.

2. Penetapan alokasi belanja daerah dapat dilakukan dengan melihat potensi pendapatan asli daerah setiap tahunnya, jika pendapatan asli daerah setiap tahun mengalami peningkatan maka target alokasi belanja setiap tahunnya pula dapat meningkat dikarenakan bahwa pemerintah daerah mampu menggali potensi daerahnya melalui pajak dan retribusi. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 2002).

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten Tojo Una-Una

Beberapa jenis potensi pajak yang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan yaitu salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sangat berpotensi untuk menambah pendapatan daerah karena setiap tahunnya kendaraan pada kabupaten tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan, selain pajak kendaraan bermotor pajak hotel juga sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak hotel merupakan pajak yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal dikarenakan bahwa kabupaten Tojo Una-una merupakan kabupaten yang penuh potensi wisata alam khususnya wisata alam laut, sehingga masyarakat yang berasal dari luar Indonesia atau masyarakat barat banyak berkunjung ke Kabupaten Tojo Una-una sehingga dari tempat pariwisata tersebut banyak penghasilan yang diterima oleh kabupaten tersebut. Pajak penerangan jalan juga mempunyai potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah bahkan hingga ke

kecamatan walea yang jauh dari kabupaten kota. Kegiatan intensifikasi pendapatan daerah melalui pajak daerah yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-una yaitu dengan cara:

- a. Mengoptimalkan kegiatan pemungutan serta pengenaan pajak dan meningkatkan kualitas aparat pemungut pajak serta pengawasan pemungutan pajak yang dilakukan oleh masyarakat serta mampu menentukan objek untuk pemungutan pajak tersebut.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk setiap peraturan daerah yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan, dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem perpajakan.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten Tojo Una-Una

Beberapa retribusi yang mempunyai peran dalam penentuan alokasi belanja daerah adalah retribusi pelayanan pasar, dimana retribusi tersebut mempunyai peran yang cukup efektif pemungutannya karena setiap tahun penerimaannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain retribusi pelayanan pasar, retribusi izin usaha perikanan juga cukup meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan bahwa daerah tersebut mempunyai potensi perikanan yang cukup baik dan daerah Kabupaten Tojo Una-una merupakan daerah yang dapat mendistribusi perikanan pada kabupaten lain seperti hasil perikanan dapat dijual di Kota Palu bahkan sampai ke Sulawesi Selatan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sumber daya alam tersebut, sehingga dapat dikatakan ketika suatu daerah menunjukkan cenderung retribusi lebih besar dibandingkan dengan pajak daerah berarti dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki pelayanan

yang baik kepada masyarakat dan hal inilah yang di bentuk oleh Kabupaten Tojo Una-una.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah pada Kabupaten Tojo Una-una menunjukkan perkembangan penerimaan setiap tahunnya mengalami perkembangan walaupun ada beberapa dinas mengalami fluktuasi bahkan penerimaannya menurun, akan tetapi dengan adanya penerimaan pajak tersebut dapat mempengaruhi peningkatan dalam pengalokasian belanja daerah.
2. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una.
3. Pajak daerah daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una.
4. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mnegucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Prof.Dr.Anhulaila Palampanga,SE,M.Si dan ibu Dr. Vitayanti Fattah, S.E., M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam proses pembimbingan selama ini.

DAFTAR RUJUKAN

Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Jakarta: Bapekki Depkeu.

- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. "Anggaran daerah dan "fiscal stress" (Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 16 (4): 346-357.
- 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaho, J.R. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Press.
- 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2005 tentang Standar Pelayan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

- Richard.M.Bird. 2000. *Intergovernmental Relation: Universal Principles Local Applications*". *International Studies Program Working Papper*. Andrew Young School of Policy Studies. Georgia, USA: Georgia State University.
- Santoso, Singgih. 2002. *SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Second Edition. New York: John Willey & Sons, Inc.
- Sidik, Machfud. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Seminar Nasional Public Scorecard, pada 17-18 April 2001. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.